

TAJUK RENCANA

Pansus Angket Haji

PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sudah dibentuk pada Selasa (9/7) lalu, namun sampai saat ini belum melakukan rapat. Rapat perdana yang sedianya dilaksanakan Rabu (17/7) lalu ditunda. Kemungkinan karena kesibukan para anggota dewan di saat reses, bukan karena menunggu selesainya penyelenggaraan ibadah haji, di mana pemulangan jemaah baru akan berakhir Senin (22/7) depan.

Pembentukan pansus memang dijamin undang-undang, artinya sudah sesuai konstitusi. Hak Angket memang menjadi salah satu hak anggota dewan. Namun banyak yang mencium aroma bau politis terhadap pembentukan pansus. Sampai-sampai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti mengeluarkan peringatan agar pansus bukan untuk kepentingan dan persaingan perseorangan sebagai politisi, melainkan dengan tujuan Perbaikan dan untuk kepentingan bangsa dan negara."Kalau motifnya itu misalnya ada agenda politik untuk menyudutkan Menteri Agama atau Kementerian Agama karena hal-hal yang sifatnya personal, harus dihindari," ujarnya kepada wartawan.

Sebagaimana dimaklumi bersama, Menteri Agama (Menag) maupun anggota DPR RI merupakan sama-sama ëmakhluk politikí. Masing-masing mungkin saja mempunyai kepentingan tersendiri, misalnya ada anggota dewan yang mengincar posisi Menag. Selain itu Yaqut yang awalnya kader PKB juga tidak sevisi dalam politik dengan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang menjadi ketua Timwas Haji DPR RI. Termasuk saat Pilpres lalu Gusmen tidak memberikan dukungan kepada Muhaimin.

Karena itu tak mengherankan kalau muncul dugaan pembentukan pansus karena ada kepentingan politik. Apalagi ada kesan buru-buru dalam pembentukan pansus, di mana proses penyelenggaraan masih berlangsung. Padahal selama ini usai penye-

lenggaran haji juga ada evaluasi, dari tingkat pusat sampai bawah, termasuk DPR dan pemerintah (Menag dan jajarannya) duduk bersama untuk melakukan evaluasi, mungkin juga untuk membahas catatan Timwas DPR yang setiap musim haji juga melakukan pengawasan.

Namun demikian, benar atau tidaknya asumsi-asumsi di atas tergantung bagaimana pansus menjalankan tugas-tugasnya nanti. Sesuai konstitusi, hak angket dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pansus akan menanyakan apakah kebijakan yang diambil Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 ada yang melanggar peraturan perundangan atau tidak. Misalnya terkait pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000, yang dibagi rata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, bukan 8.000 untuk haji khusus dan 12.000 untuk haji reguler. Isu yang muncul, pemerintah menjual tambahan kuota ke Penyelenggara Haji Khusus (PIHK).

Jadi, mestinya Pansus mempunyai niat tulus menyelidiki apakah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 terjadi pelanggaran aturan perundang-undangan atau tidak. Di sisi lain, pemerintah (Menteri Agama bersama jajarannya) pasti akan menyam-paikan pembelaan dengan berbagai data dan argumentasi yang menunjukkan tidak adanya pelanggaran peraturan. Pansus mesti mencermati dan menguji pembelaan tersebut dengan hati yang jemih sehingga menghasilkan kesimpulan atau keputusan.

Kita berharap, segenap anggota Pansus menjalankan tugasnya secara profesional, tanpa dilatarbelakangi kepentingan politik pribadi maupun kelompok. Selanjutnya, hasil atau keputusannya nanti bukan sesuai yang sudah discenario-kan sebelumnya, tetapi memang mumi apa adanya. Kita tunggu saja hasil kerja Pansus. □-d

Kultus Feodalisme: Guru Besar dan Pemujaan Artifisial

PENGANGKATAN Guru Besar di Indonesia menjadi sorotan karena proses seleksi yang kontroversial dan kurang transparan, memicu keraguan integritas di dalamnya. Beberapa kasus menunjukkan kecenderungan pengangkatan lebih berdasarkan pada hubungan personal dan politis daripada prestasi akademik, menyoro- ti masalah dalam sistem pendidikan tinggi dan keberadaan feodalisme yang kuat. Gelar akademik seperti Guru Besar dianggap prestise tinggi yang mencerminkan karier akademik yang sukses, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan meritokrasi secara akademik.

Gelar akademik di Indonesia tidak hanya sebagai simbol pencapaian intelektual, tetapi juga sebagai indikator status sosial yang dihormati, mencerminkan tradisi menghargai pendidikan formal. Kontroversi seputar pengangkatan Guru Besar menunjukkan perlunya proses evaluasi yang lebih adil berbasis meritokrasi. Praktik pengangkatan sering kali dipengaruhi oleh hubungan personal, politisasi, dan faktor non-akademis, menghadirkan tantangan dalam sistem pendidikan tinggi dan mengajukan pertanyaan kritis tentang nilai gelar akademik di era global yang kompetitif.

Akar Feodalisme

Feodalisme adalah sistem sosial-politik yang dominan di Eropa pada Abad Pertengahan, tetapi bervariasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Secara umum, feodalisme melibatkan hubungan antara tuan tanah (biasanya bangsawan atau aristokrat) dan pelayan atau petani yang memberikan jasa atau perlindungan untuk tanah atau keamanan. Di Indonesia, feodalisme tidak diorganisir persis seperti di Eropa, tetapi mencerminkan struktur sosial dan politik dengan hierarki yang kuat, dominasi oleh kelompok elite, dan penggunaan gelar atau jabatan yang menunjukkan status sosial yang tinggi.

Feodalisme di Indonesia berakar dari struktur sosial pra-kolonial yang menitikberatkan pada kepemilikan tanah dan kewajiban pelayanan kepada penguasa lokal atau raja. Sistem ini mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat melalui pertukaran perlindungan dan pelayanan. Dalam pendidikan tinggi Indonesia, feodalisme

Prof Dr Kasiyan MHum

mencakup praktik-praktik modern seperti hubungan personal, nepotisme, dan politisasi dalam pengangkatan Guru Besar serta pemberian gelar akademik tertinggi. Ini mencerminkan kecenderungan untuk menjaga hierarki elite di dunia akademik, yang sering kali mengabaikan meritokrasi dan keadilan sosial.



KR-JOKO SANTOSO

Feodalisme model baru di institusi pendidikan tinggi Indonesia telah berevolusi dari bentuk tradisionalnya di Eropa menjadi adaptasi kompleks. Meskipun ada desakan reformasi dari masyarakat dan akademisi, praktik-praktik seperti nepotisme dan pengaruh politik masih mempengaruhi proses pengangkatan dan evaluasi akademik. Transformasi yang dibutuhkan termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik ke depan.

Dampak Pemujaan Artifisial

Pengangkatan Guru Besar berdasarkan pemujaan terhadap gelar akademik berdampak besar pada dunia pendidikan di Indonesia. Pengangkatan Guru Besar yang tidak didasarkan pada meritokrasi atau prestasi akademik yang jelas, dapat menurunkan standar pendidikan tinggi secara keseluruhan. Guru Besar yang dipilih atas pertimbangan non-akademis dapat menghambat institusi dalam menghasilkan riset

berkualitas dan inovatif, serta mengurangi motivasi akademisi untuk berkontribusi maksimal. Selain itu, proses pengangkatan yang tidak transparan, juga berdampak negatif pada integritas dan reputasi institusi pendidikan tinggi, merusak citra sebagai tempat pembelajaran yang objektif dan bermartabat, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan daya tarik bagi calon mahasiswa serta peneliti. Dinamika internal di antara akademisi pun terpengaruh, dengan fokus lebih besar pada status sosial dan kekuasaan daripada pada komitmen terhadap penelitian dan pengajaran berkualitas. Penting untuk memahami dan mengatasi dampak pemujaan gelar Guru Besar ini untuk memperkuat integritas akademik institusi serta mengurangi tekanan sosial dan budaya yang muncul.

Reformasi dan Solusi

Reformasi pengangkatan Guru Besar di Indonesia perlu memprioritaskan langkah-langkah kunci untuk meningkatkan integritas dan kualitas pendidikan tinggi. Langkah pertama, meningkatkan transparansi dalam proses pengangkatan untuk mengurangi pengaruh feodalisme dan faktor non-akademis lainnya. Langkah kedua, menerapkan meritokrasi ketat dalam penilaian akademisi berdasarkan kontribusi riset, kualitas pengajaran, dan pelayanan masyarakat. Komunitas akademik dan pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung reformasi ini, dengan mempromosikan meritokrasi, transparansi, dan memberikan regulasi yang mendukung. Diharapkan langkah-langkah ini akan membangun lingkungan akademik yang lebih transparan, adil, dan berprestasi di Indonesia. □-d

*) **Prof Dr Kasiyan MHum**, Guru Besar Departemen Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Wajah Baru Kakanwil Kementerian Agama DIY

PADA Selasa (16/7) lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melantik Dr H Ahmad Bahiej SH M.Hum sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (Kakanwil Kemenag DIY) menggantikan Dr H Masmin Afif MAG. Kehadiran Ahmad Bahiej sebagai pucuk pimpinan Kakanwil Kemenag DIY menjadi energi baru untuk membangun ekosistem layanan keagamaan di Yogyakarta yang lebih baik. Selain itu, sebagai figur yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI, ia mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama.

Untuk mengemban amanah yang ditugaskan Menag tentu membutuhkan kolaborasi ekstra dengan berbagai pihak, baik di lingkup internal maupun eksternal seperti elemen organisasi keagamaan, kampus, dan pemangku kuasa publik lainnya. Terutama tantangan ke depan dalam meningkatkan iklim kerukunan beragama di Yogyakarta. Sebab, kerukunan beragama menjadi aspek paling fundamental yang ditekankan dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RP-MN) di tahun 2020-2024 melalui program pemberdayaan Moderasi Beragama. Tidak menutup kemungkinan, kerukunan akan menjadi salah satu fokus penting yang ditekankan pemerintah pusat agar bisa dijalankan secara berkelanjutan oleh berbagai pemangku kekuasaan di berbagai daerah.

Tugas baru dan amanah yang penuh tantangan tersebut bukan berarti menjadi penghalang bagi Ahmad Bahiej untuk menakhodai roda kepemimpinan Kemenag di DIY. Apalagi, ada berbagai rekam jejak yang pernah dilaluinya di lingkup di birokrasi dan akademisi yang turut menguatkan spirit pengabdian-nya dalam menjalankan berbagai tugas.

Birokrat Cum Akademis

Sebagai seorang birokrat, Bahiej diharapkan mampu menghadirkan cara

Fathorrahman Ghufron

kerja baru di berbagai layanan keagamaan di Yogyakarta. Meski moda administrasi menjadi salah satu ruh utama dalam pengembangan birokrasi di berbagai layanan publik, namun sebagai seorang akademisi yang meniti karier di dunia birokrasi tentu mempunyai ijhtihad akademik dalam mengurai setiap masalah layanan keagamaan yang lebih strategis dan prospektif.

Terlebih, Bahiej juga seorang aktivis sosial keagamaan yang bertahun-tahun berhadapan dengan aneka rupa persoalan keagamaan di level menengah ke bawah. Maka, tidak menutup kemungkinan ia akan membangun berbagai terobosan (*breakthrough*) dalam menguatkan corak keagamaan yang inklusif di berbagai fasilitas umum, seperti pendidikan, penyuluhan, aktifitas peribadatan, dan lain semacamnya.

Di samping itu, sebagai seorang birokrat *cum* akademisi, Bahiej mempunyai kompetensi keilmuan di bidang hukum. Dengan kompetensi tersebut, berbagai terobosan dan kebijakan yang akan dirancang dan dilaksanakan, tentu akan selaras dengan peraturan hukum dan norma-norma agama. Apalagi, kepatuhan terhadap dua asas pelayan masyarakat tersebut, ditekankan oleh Menag saat pelantikan dirinya sebagai Kakanwil Kemenag DIY.

Dari sekian modal sosial yang dimiliki Bahiej tersebut, tentunya masyarakat Yogyakarta sangat berharap akan terjadi perubahan cara kerja layanan keagamaan dan sistem layanan yang lebih efektif, efisien, dan *maslahat*. Demikian pula corak keberagamaan yang selama ini berlangsung dinamis dan dialektis dengan aneka macam persoalan dan afliasinya, memerlukan penyikap- an yang lebih progresif agar bisa memperkuat karakteristik Yogyakarta seba-

gai kota yang dijuluki ëSerambi Madinah yang lekat dengan kearifan lokal dan tatanan kebudayaannya.

Harapan yang begitu besar tersebut tentu dilandasi berbagai alasan, baik yang bersifat substantif maupun teknis. Apalagi Bahiej merupakan putra daerah yang tumbuh besar di Gunungkidul dan ditempa dengan berbagai corak kehidupan khas Ngayogyakarta dan mewarisi berbagai norma sosial keagamaan dari para leluhurnya.

Pada titik ini, berbagai irisan value-grafis yang melekat pada dirinya akan kian melengkapi ikhtiarnya untuk menjalankan tugas sebagai Kakanwil Kemenag DIY. Semoga perannya sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi berbagai satuan kerja menjadi energi baru yang mengantarkan wajah keagamaan dan potret keragaman di Yogyakarta yang selaras dengan nilai-nilai tradisi lokal yang luhur (*al muhafadzah ala qadimis shaleh*) dan mengembangkan inovasi baru yang lebih baik (*wal akhdzu bil jadid al ashalah*). □-d

*) **Fathorrahman Ghufron**, Wakil Katib PWNU DIY dan Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Saintek UIN Suka.

Pojok KR

Balaikota Semarang ‘diobok-obok’ KPK.

-- **Tambah lagi kasus korupsi kepala daerah.**

MUI menonaktifkan dua nama anggotanya.

-- **Sikap bulat kita memang membela Palestina.**

Belum lapor LHKN, Caleg terpilih tak dilantik.

-- **Laporan harus jujur, jangan tutupi kekayaan.**

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi.
Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.
Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSC.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyó Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com. Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaida Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.